Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika
ISSN 26158132 (cetak)
ISSN 26157667 (online)

EVALUATION OF ARKAS IMPLEMENTATION IN FINANCIAL ADMINISTRATION AT KINDERGARTENS IN TALLO DISTRICT, MAKASSAR CITY, USING THE CIPP MODEL

Sucianti[1], Rahman Pura[2], Yudi Ahmad Sadeli[3]
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya[1,2,3]
Email: sucianti275@gmail.com[1]

Corresponding Author: Sucianti**, email:** sucianti275@gmail.com

Abstrak. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) diwajibkan bagi satuan pendidikan penerima dana bantuan operasional untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan. Namun, implementasinya pada taman kanak-kanak (TK) dengan keterbatasan tenaga administrasi belum banyak dievaluasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi ARKAS berdasarkan dimensi konteks, input, proses, dan produk (CIPP) pada empat TK di Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Data dikumpulkan pada Juli 2026 melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat kepala sekolah, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil menunjukkan bahwa implementasi ARKAS berjalan cukup efektif meskipun kepala sekolah merangkap sebagai bendahara, operator, dan tenaga administrasi. Pemahaman kebijakan diperoleh melalui belajar mandiri akibat terbatasnya sosialisasi resmi, sedangkan kesiapan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Ketiadaan pemisahan fungsi diatasi melalui mekanisme pengawasan pengganti. ARKAS mendukung pemenuhan kebutuhan pembelajaran dan fasilitas, meskipun ketertiban administrasi bervariasi antarsekolah. Keberhasilan implementasi lebih bergantung pada adaptasi individual kepala sekolah daripada dukungan struktural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, pendampingan, dan dukungan tenaga administrasi.

Kata Kunci: **ARKAS, Model CIPP, Penatausahaan Keuangan, Taman Kanak-Kanak, Dana BOSP**

Abstract. The School Activity and Budget Plan Application (ARKAS) is mandatory for educational institutions receiving operational assistance funds to promote financial accountability and transparency. However, its implementation in kindergartens (TK) with limited administrative staff has not been widely evaluated. This study aimed to evaluate ARKAS implementation using the Context, Input, Process, and Product (CIPP) model in four kindergartens in Tallo District, Makassar City, Indonesia. Data were collected in July 2026 through semi-structured interviews with four school principals, observations, and document analysis. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. Data trustworthiness was established through source and method triangulation. The findings indicate that ARKAS implementation was reasonably effective despite school principals concurrently serving as treasurers, operators, and administrative staff. Policy understanding was primarily developed through self-directed learning due to limited formal socialization, while human resource readiness emerged as the main constraint. The lack of functional separation was addressed through alternative oversight mechanisms. ARKAS supported the fulfillment of learning and facility needs, although administrative compliance varied across schools. Implementation success depended more on school principals' individual adaptation strategies than on structural support. Therefore, improved policy socialization, mentoring, and administrative staffing are needed.

Keywords: **ARKAS, CIPP Model, Financial Administration, Kindergarten, BOSP Funds**

A. Introduction

Reformasi tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan, termasuk pada sektor pendidikan (Ardelia & Yuadi, 2023). Salah satu wujudnya adalah Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai sistem resmi

CC BY SA

penatausahaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) melalui Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2025 (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Melalui ARKAS, satuan pendidikan wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran, mencatat realisasi belanja, serta menyusun laporan pertanggungjawaban dalam satu sistem terintegrasi.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, mekanisme tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dana publik (Mardiasmo, 2018), dan pada satuan pendidikan akuntansi berfungsi tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas (Bastian, 2007). Penerapan akuntansi sektor publik yang transparan terbukti berkontribusi terhadap akuntabilitas kinerja instansi (Wiyana et al., 2023), sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah ditentukan oleh konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Zubaidah & Nugraeni, 2023). Kewajiban tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menghendaki pengelolaan dana pendidikan berlandaskan keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Meskipun demikian, implementasi ARKAS tidak dapat dilepaskan dari karakteristik satuan pendidikan. Kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada level satuan kerja (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022), dan kesiapan kapasitas pengelola serta dukungan sarana turut menentukan optimalisasi penggunaan ARKAS (Wachyudin et al., 2025). Pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya taman kanak-kanak (TK) yang dikelola masyarakat atau yayasan, struktur organisasi umumnya sederhana, tenaga administrasi terbatas, dan pengelolaan keuangan sering dirangkap kepala sekolah atau guru. Meskipun terdapat perbedaan karakteristik pengelolaan, studi pada TK negeri melaporkan bahwa keterlibatan langsung kepala sekolah dalam penyusunan ARKAS sangat tinggi akibat keterbatasan tenaga administrasi (Ramadhan et al., 2025). Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan persoalan serupa terkait kapasitas administrasi pada TK swasta yang perlu diperiksa lebih lanjut, tanpa mengabaikan keunikan konteks masing-masing lembaga. sementara pada sekolah dasar kendala kompetensi teknologi tenaga kependidikan masih bervariasi (Suryaman & Sutinah, 2025).

Observasi awal pada empat TK di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, menunjukkan kondisi yang serupa. Kepala sekolah tidak hanya memimpin satuan pendidikan, tetapi juga merangkap pekerjaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan ARKAS, mulai dari perencanaan anggaran, penginputan dan pemeriksaan data, penyusunan dokumen administrasi, hingga penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Dalam proses tersebut, ditemukan hambatan nyata berupa keterlambatan penyelesaian dokumen administrasi bulanan serta kesulitan teknis saat pengoperasian aplikasi akibat menu sistem yang kerap berubah Kondisi ini menjadikan implementasi ARKAS tidak sekadar persoalan penggunaan aplikasi, tetapi juga menyangkut ketersediaan tenaga, pembagian tugas, dan kompetensi pengguna.

Penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang bervariasi karena berfokus pada aspek implementasi yang berbeda, bukan karena menghasilkan kesimpulan yang saling bertentangan secara diametral. Di satu sisi, dari aspek efisiensi sistem, ARKAS terbukti memperbaiki sistem pelaporan dan mempercepat administrasi keuangan (Suryaman & Sutinah, 2025). Namun, di sisi lain, dari aspek kesiapan kapasitas, kendala sumber daya manusia, dukungan sarana yang belum merata, serta kebutuhan pendampingan berkelanjutan tetap menjadi hambatan utama di lapangan (Febriani et al., 2024; Wachyudin et al., 2025). Sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada jenjang sekolah dasar dan menengah serta bersifat deskriptif parsial, tanpa menelaah keterkaitan konteks, input, proses, dan hasil secara terpadu (Astuti, 2024). Dengan demikian, terdapat kesenjangan empiris berupa perbedaan fokus aspek keberhasilan ARKAS, kesenjangan kontekstual karena kajian pada PAUD/TK masih terbatas, dan kesenjangan

metodologis karena evaluasi terpadu pada konteks tersebut belum banyak dilakukan.

Model Context, Input, Process, and Product (CIPP) dipandang sesuai untuk mengisi kesenjangan tersebut karena menyediakan kerangka sistematis yang menilai program dari latar belakang kebijakan, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Mahmudi, 2011). Kajian literatur juga menegaskan bahwa evaluasi program sebaiknya menelaah keempat dimensi tersebut secara terintegrasi agar rekomendasi yang dihasilkan relevan dengan kondisi lapangan (Suri & Hariyati, 2024). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi ARKAS dalam penatausahaan keuangan pada TK di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, menggunakan Model CIPP.

B. METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan evaluasi program yang secara spesifik diterapkan untuk mengevaluasi implementasi ARKAS berdasarkan model Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi makna yang diberikan para pelaku terhadap suatu persoalan (Creswell & Poth, 2018) dan menangkap kompleksitas implementasi ARKAS di lapangan yang tidak dapat dijelaskan memadai oleh angka semata. Secara paradigmatik, penelitian berpijak pada interpretivisme, yang memandang realitas keberhasilan dan kendala implementasi sebagai hasil konstruksi para aktor yang terlibat (Denzin & Lincoln, 2018). Kerangka evaluasi yang digunakan adalah Model CIPP (Stufflebeam & Shinkfield, 2007) dengan empat dimensi: Context (kesesuaian program dengan kebutuhan, tujuan, dan landasan kebijakan), Input (kesiapan sumber daya), Process (pelaksanaan teknis program), dan Product (capaian program terhadap tujuan).

Penelitian dilaksanakan pada empat TK penerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) jenjang PAUD di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yaitu TK An-Nur Buloa, TK Bustanul Islamiyah, TK Citra, dan TK Bonto Marannu. Lokasi dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa TK tersebut telah menerapkan ARKAS, menerima dana BOS PAUD, bersedia berpartisipasi, dan berdasarkan observasi awal menunjukkan keterbatasan tenaga administrasi. Pemilihan beberapa lokasi memungkinkan triangulasi lokasi sehingga pemahaman tentang implementasi ARKAS pada konteks TK yang berbeda menjadi lebih mendalam.

Informan adalah empat kepala sekolah yang ditetapkan secara purposif sebagai informan kunci karena terlibat langsung, memiliki pengetahuan mendalam, dan berpengalaman dalam implementasi ARKAS (Sugiyono, 2020). Jumlah informan yang terbatas tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik karena dalam penelitian kualitatif kualitas informasi lebih penting daripada kuantitas informan (Moleong, 2021). Data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder berupa dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum (BKU), dan bukti transaksi.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara semi-terstruktur pada Juli 2026 dengan pedoman yang disusun berdasarkan empat dimensi CIPP dan memberi ruang bagi pertanyaan lanjutan (Kvale & Brinkmann, 2009). Kedua, observasi terhadap aktivitas kerja kepala sekolah dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pekerjaan teknis ARKAS. Ketiga, studi dokumentasi, yang dianalisis mengikuti langkah locating, reading, evaluating, dan final summarizing (Bowen, 2009).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014). Pada tahap kondensasi, jawaban informan dikodekan secara induktif untuk menemukan pola dan tema, kemudian dikaitkan secara deduktif dengan empat dimensi CIPP. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan jawaban keempat informan pada pertanyaan yang sama, dan

triangulasi teknik, yaitu mencocokkan pernyataan informan dengan hasil observasi serta dokumen (Denzin & Lincoln, 2018), dalam kerangka kredibilitas Lincoln dan Guba (1985). Triangulasi waktu belum dapat dilakukan secara penuh karena pengumpulan data wawancara berlangsung pada satu periode.

C. Results And Discussion

1. Karakteristik Informan dan Objek Penelitian

Keempat TK merupakan penerima dana BOSP jenjang PAUD yang telah menerapkan ARKAS. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, operasional harian, dan pemeliharaan sarana prasarana, dengan pengelolaan yang mengacu pada petunjuk teknis (juknis) BOSP. Pada praktiknya, kepala sekolah menjalankan seluruh rangkaian proses, mulai dari mempelajari juknis, menyusun prioritas anggaran, menginput data ke ARKAS, melakukan pembukuan, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban. Karakteristik informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No.	Sekolah	Jabatan / Peran Rangkap	Masa Jabatan
1	TK An-Nur Buloa	Kepala Sekolah merangkap Operator	± 5 tahun
2	TK Bustanul Islamiyah	Kepala Sekolah merangkap Bendahara, Operator, dan Tenaga Administrasi	± 6 tahun
3	TK Citra	Kepala Sekolah merangkap Bendahara, Operator, dan Tenaga Administrasi	± 7 tahun
4	TK Bonto Marannu	Kepala Sekolah merangkap Bendahara, Operator, dan Tenaga Administrasi	± 6 tahun

Tiga kepala sekolah (TK Bustanul Islamiyah, TK Citra, dan TK Bonto Marannu) menjalankan keempat peran sekaligus, sedangkan kepala sekolah TK An-Nur Buloa merangkap operator dan tetap menjalankan langsung fungsi bendahara karena keterbatasan kompetensi bendahara terhadap aplikasi. Kondisi ini berarti perencana, pelaksana, dan pengawas anggaran berada pada satu orang, padahal penatausahaan keuangan yang baik secara konseptual mensyaratkan pemisahan fungsi (*segregation of duties*).

2. Dimensi Context

Keempat kepala sekolah memahami aturan penggunaan dana BOSP dengan mempelajari juknis secara mandiri, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Kepala sekolah TK Bustanul Islamiyah dan TK Citra membedah juknis lebih rinci dan membutuhkan satu sampai dua minggu setiap ada pembaruan aturan sebelum dipetakan ke dalam RKAS. Seluruh informan menyatakan bahwa sosialisasi resmi dari dinas pendidikan tersedia tetapi frekuensinya terbatas, sehingga sebagian besar pemahaman diperoleh melalui belajar mandiri.

Prioritas anggaran disusun berdasarkan kebutuhan operasional dan pembelajaran, lalu dikomunikasikan melalui rapat bersama guru dan komite sekolah, umumnya di awal tahun ajaran sebelum RKAS disusun, dan diperkuat rapat evaluasi tambahan bila terdapat kebutuhan mendadak. TK Bustanul Islamiyah bahkan menyelenggarakan musyawarah anggaran minimal dua kali setahun. Dalam kerangka CIPP, temuan ini menunjukkan relevansi ARKAS dengan kebutuhan riil sekolah dinilai tinggi, tetapi terdapat kesenjangan antara kebutuhan pemahaman kebijakan di tingkat sekolah dan intensitas dukungan sosialisasi pemerintah daerah.

3. Dimensi Input

Seluruh informan membagi waktu antara tugas kepemimpinan dan tugas teknis berdasarkan skala prioritas. Pola paling terstruktur ditemukan di TK Bustanul Islamiyah, yaitu pagi hingga siang untuk kepemimpinan dan layanan instruksional, sedangkan input ARKAS dan pembukuan dikerjakan pada sore hari setelah kegiatan belajar selesai; pola sore hari untuk

tugas teknis juga diterapkan di TK An-Nur Buloa. Kesulitan teknis yang paling sering dihadapi adalah pembaruan sistem atau perubahan menu ARKAS, yang diatasi melalui belajar mandiri, pendampingan dinas pendidikan, dan diskusi antaroperator melalui grup komunikasi maupun pertemuan tatap muka. Kepala sekolah TK Citra menambahkan bahwa persetujuan perubahan anggaran dari dinas terkadang memerlukan satu minggu atau lebih.

Perangkat dan jaringan internet secara umum dinilai memadai, tetapi stabilitas jaringan fluktuatif. Tiga dari empat sekolah (TK Bustanul Islamiyah, TK Citra, dan TK Bonto Marannu) belum memiliki tenaga administrasi atau bendahara khusus, sehingga hampir seluruh beban teknis berada pada kepala sekolah dan hanya sesekali dibantu guru senior yang sedang tidak mengajar. Dengan demikian, titik kritis input terletak pada sumber daya manusia, bukan pada sarana.

4. Dimensi Process

Kepala sekolah menjalankan fungsi pengambil kebijakan sekaligus pelaksana teknis keuangan dengan membagi porsi kerja berdasarkan prioritas dan kemampuan harian. Kepala sekolah TK Bustanul Islamiyah sengaja memberi jeda sekitar tiga puluh menit antara pengambilan keputusan strategis dan entri data keuangan untuk menjaga fokus dan meminimalkan kesalahan input. Seluruh informan menyatakan tidak pernah mengalami konflik kepentingan yang signifikan dan berpedoman pada aturan serta kebutuhan riil sekolah; sebagai contoh, kebutuhan yang dianggap penting tetap tidak diusulkan apabila bukan komponen yang diperbolehkan juknis BOSP.

Karena tidak ada pemisahan peran yang jelas, keempat sekolah menerapkan mekanisme pengawasan pengganti berupa pengecekan dokumen dan bukti transaksi, koordinasi dengan guru dan komite sekolah, serta pemeriksaan pengawas sekolah saat monitoring. TK Bustanul Islamiyah menerapkan mekanisme paling berlapis, yakni rapat evaluasi internal berkala, verifikasi silang nota fisik dengan tim kerja sekolah, dan pelaporan berlapis. Hambatan yang paling sering disebut adalah lamanya proses administrasi dan gangguan teknis aplikasi, khususnya pada periode sinkronisasi anggaran.

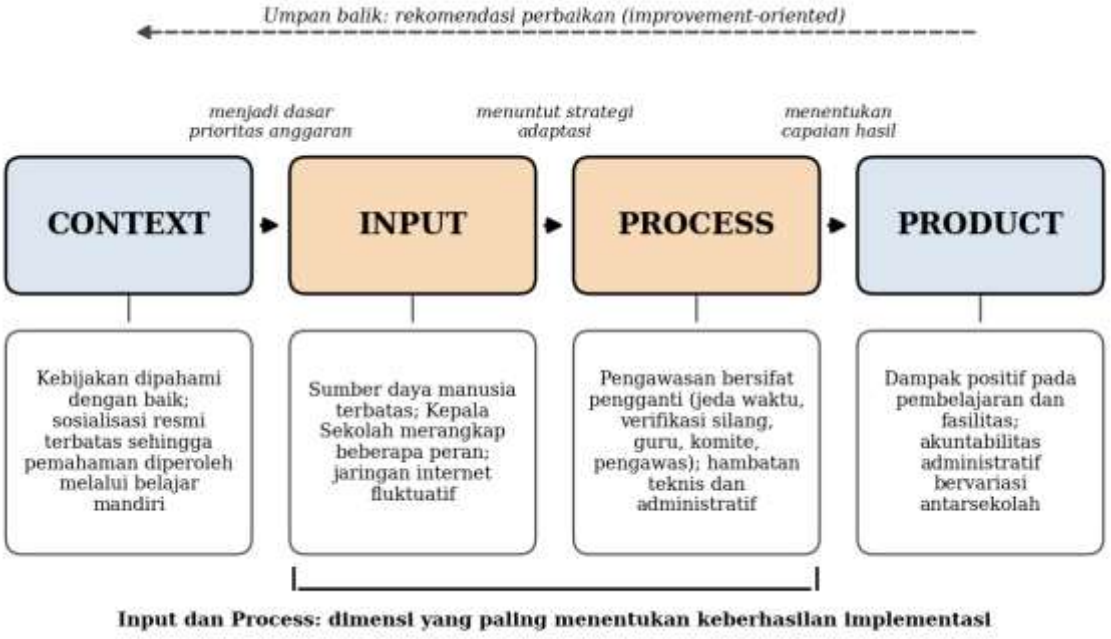
5. Dimensi Product

Seluruh informan menyatakan bahwa pengelolaan dana BOSP secara mandiri berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan pembelajaran dan perbaikan fasilitas, misalnya perbaikan dan penggantian alat permainan edukatif luar kelas serta penambahan alat peraga edukatif. Tiga dari empat informan pernah menerima catatan kecil dari tim monitoring dan evaluasi (monev) terkait laporan pertanggungjawaban dan menjadikannya bahan perbaikan administrasi dan kedisiplinan pengarsipan bukti transaksi. Hanya kepala sekolah TK Citra yang menyatakan laporannya relatif aman dari temuan, yang dikaitkan dengan kebiasaan menginput BKU setiap kali terjadi pencairan dana serta menyusun dokumen fisik dan digital secara tertib.

Keempat informan konsisten menyebut tiga kebutuhan utama agar peran rangkap dapat dijalankan lebih efektif, yaitu pelatihan berkelanjutan, aplikasi ARKAS dengan antarmuka yang lebih sederhana dan stabil, serta tambahan tenaga administrasi khusus. Seluruh informan juga mengakui bahwa menjalankan peran rangkap cukup melelahkan secara fisik maupun pikiran, terutama ketika beberapa tenggat pelaporan jatuh bersamaan.

6. Keterkaitan Antardimensi dan Analisis Kesenjangan

Keempat dimensi CIPP saling berkaitan (Gambar 1). Pemahaman kebijakan pada dimensi Context menjadi dasar penyusunan prioritas anggaran. Prioritas tersebut bergantung pada kecukupan input, terutama waktu dan tenaga, yang pada penelitian ini menjadi titik paling lemah. Keterbatasan input menuntut kepala sekolah menerapkan strategi kompensasi berupa pembagian waktu dan pengawasan berlapis pada dimensi Process, dan kualitas proses yang dijaga konsisten inilah yang pada akhirnya menentukan capaian pada dimensi Product.



Gambar 1. Keterkaitan Antardimensi CIPP dalam Implementasi ARKAS pada Kondisi Peran Rangkap

Faktor pendukung dan kendala pada setiap dimensi dirangkum pada Tabel 2. Faktor pendukung sebagian besar bersumber dari inisiatif dan komitmen internal kepala sekolah, sedangkan kendala cenderung bersifat struktural dan eksternal, seperti jumlah tenaga pengelola, stabilitas jaringan, dan kecepatan proses persetujuan.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Kendala Implementasi ARKAS Berdasarkan Dimensi CIPP

Dimensi	Faktor Pendukung	Kendala
Context	Juknis BOSP sebagai acuan resmi; forum musyawarah bersama guru dan komite dalam menyusun prioritas anggaran	Sosialisasi resmi dinas pendidikan terbatas; satu sampai dua minggu diperlukan untuk membedah setiap pembaruan aturan
Input	Komitmen dan pengalaman kerja kepala sekolah (empat sampai tujuh tahun); jejaring antaroperator; pendampingan dinas; perangkat dan internet yang secara umum memadai	Tiga TK belum memiliki tenaga administrasi atau bendahara khusus; jaringan fluktuatif; kendala teknis setiap pembaruan sistem; beban kerja dan tekanan psikologis
Process	Pembagian waktu berbasis prioritas; verifikasi dokumen dan bukti transaksi; pelibatan guru, komite, dan pengawas sekolah	Persetujuan administratif dinas yang lama; gangguan teknis pada periode sinkronisasi anggaran; tenggat pelaporan yang bersamaan
Product	Kedisiplinan pengarsipan dan penginputan BKU; catatan monev dijadikan bahan perbaikan administrasi	Ketertiban administrasi bervariasi antarsekolah; catatan kecil monev pada tiga dari empat TK

Apabila kondisi faktual dibandingkan dengan kondisi ideal berdasarkan ketentuan teknis pengelolaan dana BOSP, dimensi Input merupakan sumber kesenjangan terbesar, terutama pada kecukupan sumber daya manusia, pemisahan fungsi, stabilitas jaringan, dan pelatihan. Kesenjangan berikutnya terdapat pada dimensi Process, yakni pada independensi pengawasan dan ketepatan waktu akibat gangguan aplikasi serta proses persetujuan. Dimensi Product sebagian sesuai, dengan kesenjangan pada konsistensi ketertiban administrasi antarsekolah, sedangkan dimensi Context relatif paling sesuai karena kebijakan telah tersedia dan dipahami; kesenjangannya terbatas pada intensitas sosialisasi dan pendampingan resmi.

7. Pembahasan

Secara keseluruhan, implementasi ARKAS pada empat TK di Kecamatan Tallo berjalan cukup baik di tengah keterbatasan struktural berupa peran rangkap kepala sekolah.

CC BY SA

Keberhasilan tersebut lebih banyak ditopang oleh strategi adaptasi individual, seperti pembagian waktu kerja, pembelajaran mandiri terhadap juknis dan aplikasi, serta jejaring komunikasi antaroperator, daripada oleh dukungan struktural formal. Efektivitas pengelolaan dana BOSP pada satuan pendidikan berskala kecil dengan demikian sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen individu kepala sekolah.

Pada dimensi Context, kemampuan kepala sekolah menerjemahkan juknis yang bersifat umum menjadi prioritas anggaran yang spesifik menunjukkan keselarasan program dengan kebutuhan sasarannya, sejalan dengan penekanan Astuti (2024) bahwa evaluasi konteks menelaah peraturan yang mendasari program dan kejelasan tujuannya. Namun keselarasan ini lebih dihasilkan oleh upaya adaptif kepala sekolah daripada dukungan kebijakan yang memadai. Keterbatasan sosialisasi resmi mencerminkan jarak antara desain kebijakan yang seragam dan kapasitas pelaksana yang tidak seragam, dan kebutuhan pendampingan berkelanjutan itu sejalan dengan temuan Febriani et al. (2024). Widoyoko (2021) mengingatkan bahwa program yang secara teknis baik dapat gagal bila tidak selaras dengan konteks pelaksanaannya.

Pada dimensi Input, evaluasi input membantu mengantisipasi kegagalan program yang berpangkal pada keterbatasan sumber daya (Zhang et al., 2011). Temuan bahwa titik kritis terletak pada sumber daya manusia konsisten dengan Pratama et al. (2023) yang menempatkan kesiapan sumber daya manusia sebagai faktor paling determinan, dengan Wachyudin et al. (2025) dan Suryaman dan Sutinah (2025) mengenai keterbatasan kapasitas pengelola, serta dengan Ramadhan et al. (2025) mengenai tingginya keterlibatan kepala sekolah TK dalam penyusunan ARKAS. Temuan ini berbeda dari Shaleh dan Anhusadar (2021) yang melaporkan keterbatasan sarana pada lembaga PAUD, terutama di wilayah terpencil. Perbedaan tersebut dapat dipahami karena lokasi penelitian berada di wilayah perkotaan sehingga hambatan utama bergeser dari sarana ke sumber daya manusia. Dari sisi kompetensi, keberhasilan penatausahaan keuangan bergantung pada pemahaman pengelola terhadap siklus akuntansi (Bastian, 2007) dan pemanfaatan teknologi informasi (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022); pada penelitian ini kompetensi tersebut dibangun kepala sekolah melalui belajar mandiri, pendampingan dinas, dan jejaring antaroperator.

Pada dimensi Process, isu paling menonjol adalah ketiadaan pemisahan fungsi akibat peran rangkap. Secara ideal, pihak yang merencanakan anggaran, mencatat transaksi, dan memeriksa laporan berbeda agar terjadi pengendalian silang, sehingga sekolah harus mengandalkan mekanisme pengganti berupa jeda waktu, verifikasi dokumen, pelibatan guru dan komite, serta pemeriksaan pengawas. Mekanisme tersebut menunjukkan kesungguhan kepala sekolah menjaga kualitas proses, tetapi kekuatannya terbatas karena verifikasi oleh pihak yang sama dengan pelaksana belum sepenuhnya menjamin independensi dan sangat bergantung pada kedisiplinan individu. Pernyataan bahwa tidak pernah terjadi konflik kepentingan bersumber dari pengakuan informan sehingga perlu diperkuat kesesuaian antara praktik dan dokumen. Hambatan berupa jaringan tidak stabil dan menu aplikasi sejalan dengan Rahayu dan Wulandari (2022) di Kota Makassar, sedangkan ketidaksesuaian dengan kebiasaan penatausahaan manual yang mereka laporkan tidak muncul menonjol pada penelitian ini.

Pada dimensi Product, capaian positif berupa pemenuhan kebutuhan pembelajaran dan perbaikan fasilitas muncul meskipun proses berjalan dalam kondisi tidak ideal, sejalan dengan Rohman dan Amiruddin (2023) bahwa keberhasilan hasil tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas proses. Catatan monev pada tiga dari empat TK menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif masih perlu diperkuat, sebagaimana ditekankan pandangan bahwa akuntansi pada satuan pendidikan merupakan instrumen akuntabilitas (Bastian, 2007; Wiyana et al., 2023; Zubaidah & Nugraeni, 2023). Kebiasaan TK Citra menginput BKU pada setiap pencairan dana dan mengarsipkan dokumen secara tertib menunjukkan bahwa variasi capaian akuntabilitas antarsekolah lebih dipengaruhi oleh kedisiplinan pengarsipan dan pelaporan daripada oleh

sistem ARKAS itu sendiri. Sebagian besar data pada dimensi ini bersumber dari persepsi informan sehingga transparansi bagi pemangku kepentingan eksternal dan efisiensi dibandingkan sistem manual masih memerlukan penelaahan lanjutan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, penelitian dilakukan pada satuan PAUD dengan peran rangkap kepala sekolah yang ekstrem, suatu konteks yang masih jarang dikaji. Kedua, penerapan CIPP secara terpadu memperlihatkan bahwa dimensi Input dan Process paling menentukan keberhasilan implementasi, sekaligus menjelaskan mengapa capaian Product bervariasi. Implikasinya, kebijakan ARKAS yang seragam perlu diimbangi dukungan yang dibedakan menurut kapasitas satuan pendidikan, berupa pendampingan yang lebih intensif, penyederhanaan antarmuka aplikasi, dan kemudahan proses persetujuan bagi PAUD kecil.

D. Conclusion

Implementasi ARKAS dalam penatausahaan keuangan pada empat TK di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berjalan cukup efektif pada kondisi peran rangkap kepala sekolah, tetapi sangat bergantung pada kapasitas dan strategi adaptasi individual, bukan pada dukungan struktural yang memadai. Pada dimensi Context, kebijakan dipahami terutama melalui belajar mandiri karena sosialisasi resmi terbatas. Pada dimensi Input, kesiapan sumber daya manusia menjadi titik paling kritis. Pada dimensi Process, ketiadaan pemisahan fungsi dikompensasi dengan jeda waktu kerja, verifikasi dokumen berlapis, serta pengawasan informal oleh guru, komite, dan pengawas sekolah. Pada dimensi Product, ARKAS berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan pembelajaran dan fasilitas, sementara ketertiban administrasi masih bervariasi antarsekolah.

Kepala sekolah disarankan mempertahankan pembagian waktu berbasis prioritas dan memperkuat pengarsipan bukti transaksi secara harian. Dinas Pendidikan Kota Makassar disarankan meningkatkan sosialisasi dan pendampingan teknis serta mempercepat persetujuan perubahan anggaran, yayasan dan pengelola TK mempertimbangkan penambahan tenaga administrasi atau bendahara khusus meskipun paruh waktu, dan pengembang ARKAS menyederhanakan antarmuka serta menstabilkan sistem pada periode sinkronisasi anggaran. Penelitian ini terbatas pada empat kepala sekolah di satu kecamatan dengan data yang bersumber terutama dari persepsi informan pada satu periode (Juli 2026); penelitian lanjutan dapat melibatkan bendahara, operator, pengawas, dan petugas dinas, jenjang atau wilayah lain, serta model evaluasi pembanding.

DAFTAR PUSTAKA

Ardelia, S. I. M., & Yuadi, I. (2023). Digital government dalam menciptakan transparansi pelayanan publik: Suatu analisis berdasarkan perspektif bibliometrik. Tibanndaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 7(2), 111–128. https://doi.org/10.30742/tb.v7i2.2937

Astuti, A. (2024). Evaluasi model context, input, process dan output pada program sekolah Adiwiyata. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 10(2), 398–407. https://doi.org/10.31949/educatio.v10i2.7326

Bastian, I. (2007). Akuntansi pendidikan. Erlangga.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). The SAGE handbook of qualitative research (5th ed.). SAGE Publications.

Febriani, S., Zakir, S., Ilmi, D., & Setia Pramana, R. (2024). Evaluasi program sekolah digital dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam, 7(2), 752–761. https://doi.org/10.58401/dirasah.v7i2.1389

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Kemendikbudristek.

Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. Akuntansiku, 1(4), 299–319. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing (2nd ed.). SAGE Publications.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.

Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu model evaluasi program pendidikan. At-Ta'dib, 6(1). https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.551

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi Offset.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Pratama, D. N., Hermawan, A., & Sari, N. K. (2023). Evaluasi implementasi aplikasi ARKAS pada sekolah dasar negeri di Kota Surabaya menggunakan model CIPP. Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia, 14(2), 112–128. https://doi.org/10.21070/jmpi.v14i2.1893

Rahayu, S., & Wulandari, T. (2022). Kendala implementasi ARKAS di sekolah dasar: Studi kasus di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan, 7(1), 45–60.

Ramadhan, L. S., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Penerapan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS) dalam perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah: Studi kasus di TK Negeri wilayah administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 3(4), 5452–5466.

Rohman, M., & Amiruddin, S. (2023). Evaluasi program manajemen keuangan berbasis teknologi pada lembaga pendidikan nonformal menggunakan Model CIPP. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 8(1), 23–41.

Shaleh, M., & Anhusadar, L. (2021). Evaluasi input standar sarana dan prasarana pada lembaga PAUD. Aulad: Journal on Early Childhood, 4(3), 186–192. https://doi.org/10.31004/aulad.v4i3.153

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation theory, models, and applications. Jossey-Bass.

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. Alfabeta.

Suri, S., & Hariyati, N. (2024). CIPP evaluation model in the educational evaluation: A literature study. Cahaya Pendidikan, 10(1), 20–30. https://doi.org/10.33373/chypend.v10i1.5950

Suryaman, M., & Sutinah, T. (2025). Implementasi aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS) dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah dasar. Jurnal Tahsinia, 6(6), 853–864. https://doi.org/10.57171/jt.v6i6.705

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wachyudin, S., Wardiah, D., & Destiniar, D. (2025). Optimalisasi penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS) dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri Kecamatan Mesuji. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(1). https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18009

Widoyoko, E. P. (2021). Evaluasi program pembelajaran: Panduan praktis bagi pendidik dan calon pendidik (cet. ke-9). Pustaka Pelajar.

Wiyana, A., Sufiati, S., Sambo, E. M., & Nurasratunnisa, Y. (2023). Penerapan akuntansi sektor publik dan transparansi laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo, 9(2), 240–252. https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i2.1588

Zhang, G., Zeller, N., Griffith, R., Metcalf, D., Williams, J., Shea, C., & Misulis, K. (2011). Using the context, input, process, and product evaluation model (CIPP) as a comprehensive framework to guide the planning, implementation, and assessment of service-learning programs. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 15(4), 57–84.

Zubaidah, A. N., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 7(3), 978–988. https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.34